

**RENSTRA
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2017**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2014 - 2018

2014 - 2018

DINAS PP DAN KB
KOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

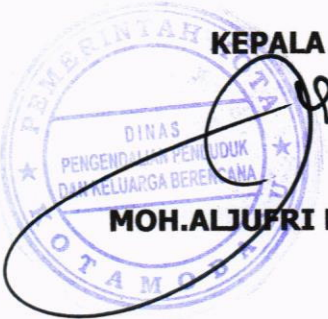
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua berkat, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkanNya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2018 sebagai data dan informasi yang dikeluarkan oleh PP dan KB Kota Kotamobagu.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penyajian data dan informasi pengawasan baik berdasarkan data yang lampau maupun yang diproyeksikan kedepan selama 2014 – 2018. Kita sadari saat ini bahwa data dan informasi yang akurat sangatlah penting untuk dijadikan bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan suatu institusi/organisasi dan keterkaitannya dalam mencapai apa yang diharapkan kedepan. Oleh karena itu diharapkan Dokumen Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kotamobagu.

Rencana Strategis ini merupakan seluruh rangkaian proses pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan selama Tahun 2014 – 2018 baik itu program utama maupun program tambahan/penunjang demi terciptanya suatu pemerintahan Kota Kotamobagu yang baik dan bersih (*Good And Clean Governance*).

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, namun dengan bekerja keras dalam melaksanakan setiap apa yang telah ditetapkan menjadi suatu harapan kita semua.

Kiranya Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2018 ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Kotamobagu Lima (5) Tahun kedepan.

**KEPALA DINAS**
MOH.ALJUFRI NGANDU S.PD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. LATAR BELAKANG.....

1.2. LANDASAN HUKUM.....

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN UMUM.....

2.1 . TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....

2.2. SUMBER DAYA

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....

3.3. TELAAHAN VISI MISI KOTA KOTAMOBAGU DENGAN INSPEKTORAT.....

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....

4.1. VISI DAN MISI.....

4.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK.....

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN.....

5.2. INDIKATOR KINERJA.....

5.3. PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP.....

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan pemerintahan saat ini, sangat diperlukan adanya peran pengawasan demi terwujudnya suatu birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Guna mencapai suatu kinerja maksimal, Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu harus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme apratur pengawas. Untuk itulah PP dan KB selaku Instansi di Daerah bertugas membantu Pemerintah Daerah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari berbagai aspek baik tugas Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan demi tercapainya Visi dan Misi Kota Kotamobagu.

Dinas PP dan KB Kotamobagu dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai apa yang telah ditetapkan harus mengacu pada Rencana Strategi karena Renstra merupakan pedoman dari pada Dinas PP dan KB yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Kebijakan selama 5 Tahun kedepan. Renstra disusun melalui tahapan – tahapan melihat dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga dapat merumuskan kebijakan – kebijakan yang dapat diambil dalam upaya membantu Kepala Daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada RPJMD, dimana Renstra Dinas PP dan KB merupakan bagian dari rangkaian Renstra Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang RI Nomor. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara.
7. UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas PP dan KB
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu.
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai bentuk pedoman dari Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dengan memuat langkah – langkah/program strategi yang akan dilaksanakan sehubungan membantu mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan menyiapkan kebijakan dalam bidang pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama periode 5 tahun kedepan.
2. Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah memberi arah kemana Institusi pengawasan ini akan dibawa selama periode 5 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan .

Penulisan Renstra Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu ini dalam bentuk bab yang menguraikan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan Program/kegiatan.

Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS berdasarkan tugas dan fungsi

- 3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi , Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.4. Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis

3.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

5.3. Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Kotamobagu merupakan unsur pelaksana bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pengendalian Penduduk serta kegiatan Keluarga Berencana. Tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu mengacu pada Peraturan Walikota Kota Kotamobagu nomor : 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas PP dan KB mempunyai fungsi:

1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kota dalam Dinas PP dan KB;
3. Penyiapan Kebijakan operasional Dinas PP dan KB
4. Pengelolaan informasi keluarga dan analisis program Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
6. Pengelolaan ketatausahaan Dinas
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Peregerakan :
 1. Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 2. Kepala Seksi Penyuluhan, Pengendalian Penduduk dan informasi Keluargal;

- d. Bidang Kelaurga Berencana :
 1. Kepala Seksi Pengendalian, Distribusi, dan Pelayanan KB;
 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan ber - KB;
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Kepala seksi Pemberdayaan ;
 2. Kasubid Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
 1. Kepala seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
9. Kelompok jabatan fungsional

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana.

Untuk mnyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas PP dan KB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Kelyarga Berencana;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Peningkatan sumberdaya kualitas mmanusia di bidang pengendalian penduduk dan kelaurga berencana;
- f. Peantauan, Pengawasan,aluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

B. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatatusahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
4. Penyelenggaraan ususan umum dan kepegawaian;

5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatatusahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sub umum dan kepegawai mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
- d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana;
- e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
- f. Melaksanakan penata dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. Mengelolah dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan
- h. Melaksanakan urusan administrasi ,pembinaan dan penagwasan kepegawaian;
- i. Mengelolah dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/ aset kantor baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- l. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan dan tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- m. Melaksanakan marakan funsionitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

D. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang sub bidang dalam unit kerja, melaukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja dan untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Mengumpulkan, mengkoordinasi dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari masing – masing unit kerja;

- d. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan, mengkoordinasi dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja tahunan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana strategis dan rencana kerja;
- e. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisa rancangan dan rencana anggaran / keuangan dan belanja;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan / anggaran;
- g. Menyiapkan menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran
- h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan / data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
- i. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

E. Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan pergerakan

Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan pergerakan, bidang pengendalian penduduk dan KB
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk , sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB
- d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan KB
- g. Pelaksanaan pemberdayaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga penyuluhan advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk; sistem informasi keluarga , penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan KB
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

f.1 Kepala seksi advokasi dan Pergerakan

Seksi advokasi dan pergerakan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan ; dan

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
- f.2 Kepala seksi penyuluhan, pengendalian penduduk dan informasi Keluarga
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta peantauan dan evaluasi penginformasi keluarga dan
 - b. Melakukan penyiapan bahan prosedur, pembinaan , pembimbingan, dan pelaksanaan, kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan informasi keluarga;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang fungsi dan tugas

F. Bidang Keluarga Berencana

1. Bidang keluarga brencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang KB Daerah
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 9, bidang keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang KB
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang KB
 - c. Pelaksanan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteriaa bidang KB
 - d. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah
 - e. pelaksanaan peayanan KB daerah
 - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB
 - h. Pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi

g.1 Seksi Pendalian, distribusi dan pelayan KB

Seksi pengendalian, distribusi dan pelayanan KB mempunyai tugas dan fungsi :

- 1 Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi
- 2 Menyiapkan bahan pembinaan, pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jainan pelayanan KB
- 3 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

g.2 Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- KB

Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber –KB mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyiapakn bahan pembinaan, pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber – KB dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

2.2. Sumber Daya

1. Kepegawaian

Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dalam perkembangannya terus menjadi salah satu Instansi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terciptanya suatu pemerintahan yang sesuai bersih dan bebas KKN. Tapi hal itu tentunya harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/PNS saat ini dan kebutuhannya kedepan dapat dilihat pada table berikut:

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Ruang / Ruang	Sekretariat		Bidang KB		Bidang KS		Bidang Daiduk		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
I/a											
I/b											
I/c											
I/d											
II/a		1									1
II/b		2									2
II/c		1									1
II/d											
III/a							1				1
III/b		2									2
III/c		1	1	1					1		4
III/d				1		2					3
IV/a								2			
IV/b	2								2		4
IV/c											
IV/d											
IV/e											
JUMLAH	2	7	1	2		3		3	3		18
TOTAL	9		3		3		3		18		

: Sub bag Umum dan Kepegawaian
(Desember 2017)

TABEL II.2

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

Pendidikan	Sekretariat		Bidang KB		Bidang KS		Bidang DalDuk		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD / MI											
SLTP / MTS											
SLTA / MAS		4	1			1		1	1	6	7
D1											
D2											
D3											
S1	2	3		2		2		2	2	9	11
S2											
S3											
Jumlah	2	7	1	2		3		3	3	15	18
Total	9		3		3		3		18		

Sumber. Sub bag Umum dan Kepegawaian (Desember 2017)

PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1	
2	Sekretaris	S1	
3	Kabid. Pengendalian Penduduk, penyluhan dan pergerakan	S1	
4	Kabid. Keluarga Berencana	S1	
5	Kabid ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	S1	
6	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1	
7	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	S1	
8	Kasie Advokasi dan Pergerakan	SMA	
9	Kasie Penyluhan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	-	
10	Kasie Pengendalian, Distribusi dan Pelayanan KB	SMA	
11	Kasie Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber – KB	S1	
12	Kasie Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	SPK/SMA	
13	Kasie Bina Ketahanan Keluarga	S1	
14	Kepala UPTD-KB Ktg Utara	S1	
15	Kepala UPTD-KB Ktg Timur	S1	
16	Kepala UPTD-KB Ktg Barat	S1	
17	Kepala UPTD-KB Ktg Selatan	S1	

18	Staf - Sabina mokoginta - Titin P. Binol - Pricilia P. Tampi - Opiyanti simbala - Meida V. Damopolii - Rinny ayuba, SH	SMA SMA SMA SMEA S1 S1	Sarjana S1 : 11 Orng Sma sederajat : 7 orng
----	---	--	---

2. Aset/Inventaris

Guna mewujudkan tugas-tugas pengawasan, maka Dinas PP dan KB didukung dengan sarana dan prasarana berupa peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan operasional roda 4, kendaraan operasional roda 2 dan barang lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan walaupun dari segi kecukupan belum memadai Sebagaimana tersebut dibawah ini :

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit/buah/set)	Ket.
1	Bangunan /Gedung kantor tempat bekerja	1	
2	Bagunan/Gedung kantor UPT-KB	4	
3	Gudang alat/obat <i>kontrasepsi</i>	1	
	Kendaraan dinas operasional beroda empat	6	
4	Mobil Unit Penerangan KB	2	
5	Mobil Unit Pelayanan KB Keliling	2	
6	Kendaraan Dinas operasional roda dua	26	
7	Mobil Akseptor	1	
9	Meja Kerja	9	
10	Meja rapat	16	
11	Kursi kerja	2	
12	Kursi Sofa	1	
13	Kursi panjang	2	
14	Lemari arsip	20	
15	Dispenser	1	
16	Papan struktur	1	
17	Meja Kerja Direksi	3	
18	Kursi kerja	2	
19	Kursi direksi	4	
20	Komputer	16	
21	Laptop	3	
22	Wireles	3	
23	Printer	12	
24	Camera digital	3	
25	Mesin ketik		
26	Obgyn bed	4	
27	Alat peraga BKB Kit		
28	Alat peraga KIE Kit		
29	Brankas		
30	AC (air conditioner)	9	
31	Alat-alat kedokteran IUD Kit	4	
32	Alat-alat kedokteran Impant Kit		
33	KIE kit		
34	KIE/Advokasi KB (public Adres)		
35	Faksmili		
36	Instalasi telpon		
37	Kipas angina	1	

38	HSDPA/3G/GPRS Huawei/E 585		
39	Megaphone		
40	Smartphon	22	

2.3. Kinerja Pelayanan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma kecil bahagia sejahtera. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program Keluarga Berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbuhan. Pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Berbagai pelayanan Kepada masyarakat melalui :

1. Pelayanan pengaturan kelahiran melalui peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif.
2. Pelayanan Reproduksi Sehat melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan penundaan anak pertama (PAP)
3. Pelayanan Ketahanan Keluarga melalui pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam program KB sebagai upaya transformasi pengetahuan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok akseptor, posyandu, PIKRR, kelompok pemuda.
5. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan daerah, pelayanan ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan program KB yang sudah dicapai dengan melakukan pendataan keluarga sejahtera setiap tahun untuk melihat data demografi, data keluarga berencana dan data keluarga sejahtera, tahapan keluarga Pra KS, KS I, KS II, KS III dan KS III+.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Tantangan

- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan yang menyangkut sistem kerja
- Rentannya masyarakat terhadap isu global;
- Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah;
- Mengikutsertakan setiap aparatur dalam setiap pelatihan maupun

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan.

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD yaitu :

1. Kurangnya pegawai;
2. Etos kerja pegawai perlu ditingkatkan;
3. Perlindungan anak dan pemenuhan hak mereka masih terus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang;
4. Penurunan cakupan peserta KB aktif perlu menjadi perhatian, terkait upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk KotaKotamobagu dalam rangka menuju masyarakat sehat sejahtera;
5. Kurangnya tenaga penyuluh KB
6. Intensifikasi pelayanan KB secara terus menerus.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

1. Kurangnya pegawai;
2. Etos kerja pegawai perlu ditingkatkan;
3. Kualitas Sumber Daya Aparatur perlu ditingkatkan;
4. Sarana dan prasarana cukup memadai;
5. Penurunan cakupan peserta KB aktif perlu menjadi perhatian, terkait upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk KotaKotamobagu dalam rangka menuju masyarakat sehat sejahtera;
6. Kurangnya tenaga penyuluh KB baik kualitas maupun kuantitas;

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu .

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagusejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018.

Visi Pembangunan Kota Kotamobagu:

"TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING"

Misi Pembangunan Kota Kotamobagu:

Sesuai dengan visi **"Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa dikawasan Bolaang Mongondow Raya menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing"**, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Kotamobagu 2013 – 2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang berkualitas dengan mempertahankan keunikan kota sebagai kawasan pengembangan pertanian organik penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow Raya ;
- Misi 2 : Mewujudkan system pendidikan dan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya;
- Misi 3 : Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan local;
- Misi 4 : Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota dinamis, kreatif dan inovatif yang didukung oleh masyarakat egaliter, menghargai kesetaraan gender, menghormati supremasi hukum, berkeadilan dan demokratis berdasarkan Falsafah Dodandian Paloko-Kinalang (penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clear Government);

Penjelasan dari visi diatas, sebagai berikut:

1. **Kotamobagu Kota Model Jasa**, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model di kawasan Bolaang Mongondow Raya
2. **Kotamobagu Sejahtera**, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nyaman, harmonis, untuk menuju kehidupan yang damai dan makmur.
3. **Kotamobagu Berbudaya**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki etos peradaban modern, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat Bolaang Mongondow.
4. **Kotamobagu Berdaya Saing**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang disiplin dan berprestasi serta bebas KKN dan mewujudkan kesetaraan gender melalui :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
2. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
3. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak;
5. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
6. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) atau anak;

Pernyataan misi ke 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional dan berdaya saing;

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinjas PP dan KB Kota Kotamobagu dalam meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan Keluarga Berencana melalui :

3. Pelayanan Kontrasepsi;
4. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat;
5. Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS;
6. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
7. Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Kb diklinik KB dan kendaraan pelayanan KB Keliling;

Pernyataan misi ke 3 : Meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dalam mewujudkan sarana pusat informasi dan komunikasi melalui :

1. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja;
2. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
3. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu;
4. Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja pembinaan program KKB dan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi program KKB tenaga lini lapangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tahun 2013-2018, maka visi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu tahun 2013 – 2018 adalah:

***“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”***

Diharapkan dengan terumuskannya visi PP dan KB Kota Kotamobagu tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas atau badan untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi PP dan KB Kota Kotamobagu tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima dibidang Keluarga Berencana .
2. Mewujudkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Mewujudkan generasi Kota Kotamobagu yang berkualitas.
4. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang efektif efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi, Kebijakan dan Program

Adapun strategi dan kebijakan sehubungan dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

Adapun tujuan dan sasaran dengan misi yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dikaitkan dengan program dan kegiatan diuraikan pada tabel 3 sebagai berikut :

4.2.1 Tujuan :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dibidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana;
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Penyediaan informasi/database dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Peningkatan pemberdayaan dan perawatan lanjut usia;
5. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping bina keluarga;
7. Pengendalian Laju pertumbuhan penduduk;
8. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja;

4.2.2 Sasaran :

1. Meningkatnya disiplin aparatur
2. Meningkatnya kualitas pelayanan apartur dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan apartur dibidang Perlindungan anak dan keluarga berencana
4. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
5. Tersedianya sarana dan prasarana tumbuh kembang anak
6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana
7. Meningkatnya kualitas hidup lanjut usia
8. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan
9. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendamping dan keluarga
10. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
11. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja

4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas PP dan KB dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Dinas PP dan KB dalam pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan disiplin aparatur;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparaturnya dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
5. Peningkatan sarana dan prasarana tumbuh kembang anak;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana
7. Menyediakan sarana dan prasarana bina keluarga lansia;
8. Peningkatan SDM bagi tenaga pendamping Tribina
9. Perumusan kebijakan pengendalian penduduk yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas;
10. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang berkualitas;

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan disiplin kerja aparatur
2. Melaksanakan Kebijakan peningkatan peran Kader
3. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi
4. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga pendamping Tribina
5. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
6. Menyediakan sarana dan prasarana fisik pelayanan keluarga berencana, KIE
7. Jaminan perawatan kesehatan bina keluarga lansia
8. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga pendamping Tribina
9. Melakukan advokasi, sosialisasi, promosi dan fasilitasi kepada semua stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan

10. Meningkatkan advokasi, dan KIE tentang KRR

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk periode Tahun 2013 – 2018, Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu menggagendakan rencana program dan kegiatan yaitu :

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Kantor Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu tahun 2017 yang terdiri dari 7 Program dan 27 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1).

No. Urut	No. Keg	Kegiatan	Keluaran Kegiatan
1	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan cakupan jumlah materai
2	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan daya listrik kantor, gudang alokon dan gedung UPPKS kampung KB
3	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan tenaga dan pengelola keuangan dan tenaga honor
5	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan tenaga kebersihan kantor
6	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia
7	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Cakupan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
8	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Cakupan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9	15	Penyediaan nahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Cakupan jumlah bahan bacaan SKH
10	17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makan minum tamu kantor
11	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan jumlah rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2).

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No. Urut	No. Keg	Kegiatan	Keluaran Kegiatan
1	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor

2	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor
3	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas
4	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

3. Program Keluarga Berencana (15)

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No. Urut	No. Keg	Kegiatan	Keluaran Kegiatan
1	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif meningkat
3	07	Rapat kerja daerah Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Perayaan Hari Keluarga Nasional
4	08	Operasional PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, dan BKL	Tersedianya tenaga PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL dan PIK-R
5	09	Pelaksanaan hari Keluarga Nasional	Terlaksananya kegiatan Perayaan Hari Keluarga Nasional
6	10	Penyedia informasi data Mikro	Cakupan Penyedia informasi data mikro keluarga setiap desa / kelurahan

4. Program Pelayanan Kontrasespsi (17)

Program ini terdiri dari kegiatan :

No. Urut	No. Keg	Kegiatan	Keluaran Kegiatan
1	01	Pelayanan konseling KB	Terlaksananya Pelayanan konseling KB

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan pekayaan KB Keliling (DAK) (26).

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No. Urut	No. Keg	Kegiatan	Keluaran Kegiatan
1	03	Pengadaan Sarana Unit Penerangan Kb (DAK)	Cakupan sarana dan Prasarana mobil unit Penerangan

6. Program Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja pembinaan program KKB dan sarana pengolahan dan pelaporan data / informasi program KKB tenaga lini lapangan (29).

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No. Urut	No. Keg	Kegiatan	Keluaran Kegiatan
1	09	Distribusi alat dan Obat kontrasespsi (DAK Non Fisik)	Tersedianya Bahan bakar minyak untuk distribusi alokon
2	01	Pengadaan Sarana kerja bagi UPT, PKB / PLKB dan PPKBD serta sub PPKBD (DAK)	Tersedianya sarana kerja KKB
3	03	Pengadaan Personal Computer (PC) untuk balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan dan gudang alat / Obat kontrasespsi (DAK)	Cakupan Jumlah pengadaan Personal Computer
4	08	Operasional Penyuluh KB (DAK non Fisik)	Tersedianya operasional penyuluh KB

7. Program Peningkatan sarana dan prasarana fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan KKBPK serta Generasi Berencana KIT Media Advokasi dan KIE (30).

1	01	Pengadaan Generasi Berencana KIT (Genre KIT)	Cakupan jumlah Generasi berencana

5.2. Indikator Kinerja

Untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan maka setiap program ditetapkan target pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja dan Pencapaian Program Dinas PP dan KB
Kota Kotamobagu Tahun 2017

TABEL III : INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
No	Tujuan	sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
				Target	Target	Target	Target	Target
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidangPengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dibidang Pengendalian penduduk Anak dan keluarga Berencana	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90	90	90	90	90
								Dinas PP dan KB

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
2	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90	90	90	Dinas PP dan KB

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur dibidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90	90	90	90	90	dinas PP KB

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan kapasitas sumberdaya kapasitas aparatur Pengendalian Penduduk DAN Kelaurga Berencana	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dibidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek,pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya	5	5	25	30	35	Dinas PP dan KB

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibiidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya Sarana dan prasarana tumbuh kembang anak	Cakupan layanan informasi tumbuh kembang anak	60	30	50	20	10	Dinas PP dan KB

6. Program keluarga berencana									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Cakupan persentase peserta KB aktif terhadap wajib KB	82	83	85	87	90	Dinas PP dan KB

7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	85	87	90	92	95	Dinas PP dan KB

1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Cakupan persentase wajib KB yang terlayani alat kontrasepsi	82	83	85	87	90	Dinas PP dan KB
---	--	------------------------------------	---	----	----	----	----	----	-----------------

9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Cakupan jumlah kelompok mandiri peduli KB	0	0	1	3	3	Dinas PP dan KB

10. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan Kualitas perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas perempuan dan anak	Cakupan jumlah kematian ibu, bayi dan anak	19	16	13	10	7	Dinas PP dan KB

11. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	85	87	90	92	95	Dinas PP dan KB

12. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

12. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya Sarana dan prasarana tumbuh kembang anak	Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	60	30	50	20	10	Dinas PP dan KB

13. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping Bina Keluarga	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendamping bina keluarga	Cakupan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	120	120	320	700	700	Dinas PP dan KB

14. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	

1	Peningkatan kualitas perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Cakupan jumlah model operasional BKB, Posyandu-PADU yang dilaksanakan	0	0	4	33	33	Dinas PP dan KB
---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----------------

15. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang Berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah sarana dan prasarana fisik	0	0	1	0	0	Dinas PP dan KB

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kelengkapannya, KB dan Konseling Remaja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	

1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah sarana dan prasarana KIE KTT, KKBPK dan KR	7	6	16	10	10	Dinas PP dan KB

17. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah sarana dan prasarana kerja KKB	0	60	134	33	30	Dinas PP dan KB

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PP DAN KB MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu tentunya mengacu pada RPJM-N. Dalam bidang pengawasan, Sasaran Srtatejik mengacu pada RPJMD. Sasaran strategik dan indikator kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun kedepan sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, penjabarannya sebagaimana dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Penjabaran Sasaran Strategik dan Indikator Kinerja
Dinas PP dan KB Daerah Kota Kotamobagu

TABEL III : INDIKATOR KINERJA SASARAN

**1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran**

No	Tujuan	sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidangPengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dibidang Pengendalian penduduk Anak dan keluarga Berencana	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90	90	90	90	90	Dinas PP dan KB

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
2	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90	90	90	Dinas PP dan KB

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur dibidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90	90	90	90	90	dinas PP KB

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sumberdaya kapasitas aparatur Pengendalian Penduduk DAN Keluarga Berencana	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dibidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya	5	5	25	30	35	Dinas PP dan KB

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya Sarana dan prasarana tumbuh kembang anak	Cakupan layanan informasi tumbuh kembang anak	60	30	50	20	10	Dinas PP dan KB

6.Program keluarga berencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Cakupan persentase peserta KB aktif terhadap wajib KB	82	83	85	87	90	Dinas PP dan KB

7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	85	87	90	92	95	Dinas PP dan KB

1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Cakupan persentase wajib KB yang terlayani alat kontrasepsi	82	83	85	87	90	Dinas PP dan KB
---	--	------------------------------------	---	----	----	----	----	----	-----------------

9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Cakupan jumlah kelompok mandiri peduli KB	0	0	1	3	3	Dinas PP dan KB

10. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan Kualitas perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas perempuan dan anak	Cakupan jumlah kematian ibu, bayi dan anak	19	16	13	10	7	Dinas PP dan KB

11. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	

1	Peningkatan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	85	87	90	92	95	Dinas PP dan KB
---	---	--	--	----	----	----	----	----	-----------------

12. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya Sarana dan prasarana tumbuh kembang anak	Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	60	30	50	20	10	Dinas PP dan KB

13. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping Bina Keluarga	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendamping bina keluarga	Cakupan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	120	120	320	700	700	Dinas PP dan KB

14. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan kualitas perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Cakupan jumlah model operasional BKB, Posyandu-PADU yang dilaksanakan	0	0	4	33	33	Dinas PP dan KB

15. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang Berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah sarana dan prasarana fisik	0	0	1	0	0	Dinas PP dan KB

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Kelengkapannya, KB dan Konseling Remaja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah sarana dan prasarana KIE KIT, KKBPB dan KR	7	6	16	10	10	Dinas PP dan KB

17. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Lokasi
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan jumlah sarana dan prasarana kerja KKB	0	60	134	33	30	Dinas PP dan KB

BAB VII

PENUTUP

Rencana Stratejik ini disusun sebagai bentuk pedoman pelaksanaan dan tolok ukur menilai pencapaian pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan selama 5 tahun periode RPJMD 2015 – 2018. Dimana setiap tahun dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Tahunan. Dengan harapan setiap strategi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan guna mencapai Visi dan Misi Instritusi teristimewa dapat membantu pencapaian Visi dan Misi Kota Kotamobagu.

Kotamobagu

2017

**KEPALA DINAS PP DAN KB**
MOH. ALJUFRI NGANDU S. PD